

## Analisis *Flypaper Effect* Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi *Flypaper Effect Analysis of District and City Regionally Spending in Sulawesi*

Muhamad Armawaddin<sup>a,\*</sup>, Wali Aya Rumbia<sup>a</sup>, Muhammad Nur Afiat<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

[diterima: 22 September 2017 — disetujui: 15 Februari 2018 — terbit daring: 19 April 2018]

### Abstract

*This study aims to determine the phenomenon of flypaper effect of regionally spending in Sulawesi. Types of data use secondary data about regionally original income, general allocation fund, special allocation fund, tax-sharing fund, and regionally spending in 2016–2017. Data analysis using panel data regression analysis. Result of research, found flypaper effect of regional spending from special allocation fund, whereas from general allocation fund and tax-sharing fund is not found. This study also proves that regionally spending, general allocation fund, special allocation fund, and tax-sharing fund have a significant influence on regionally spending in Sulawesi.*

**Keywords:** Regionally Spending; Flypaper Effect; Panel Data Models

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena *flypaper effect* belanja daerah di Sulawesi. Jenis data menggunakan data sekunder tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan belanja daerah tahun 2016–2017. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menemukan adanya *flypaper effect* pada belanja daerah dari dana alokasi khusus, sedangkan dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak tidak ditemukan. Penelitian ini juga membuktikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Sulawesi.

**Kata kunci:** Belanja Daerah; *Flypaper Effect*; Model Data Panel

**Kode Klasifikasi JEL:** H71; H72; C33

## Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah akan berpengaruh kepada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berkaitan erat dengan pemberian kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan-urusan daerahnya yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sumber-sumber pokok keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan berimplikasi pada struktur dan proporsi pengeluaran dan penerimaan pada APBD kabupaten dan kota (Mardiasmo, 2004).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa manajemen keuangan daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran daerah. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi sangat luas pada kedua komponen tersebut dan tentunya akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan erat dengan pemberian kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan me-

\*Alamat Korespondensi: Jl. EA. Mokodompit, FEB Universitas Halu Oleo. E-mail: adiox68@gmail.com.

mentukan penggunaan dana untuk melaksanakan program-program pembangunan daerahnya.

Diperjelas kembali oleh Mardiasmo (2004), bahwa lemahnya perencanaan pengeluaran, sebagaimana yang telah dipaparkan, akhirnya memunculkan kemungkinan *under financing* atau *over financing*, yang kesemuanya memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan perencanaan belanja daerah adalah rendahnya kapasitas program untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik serta tingkat efisiensi pelaksanaan belanja daerah yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya sebagai instrumen kebijakan dan manajemen secara optimal. Sebagai instrumen kebijakan, pemerintah daerah harus mampu menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Selanjutnya sebagai instrumen manajemen, anggaran daerah harus mampu menampung dan mengakomodir berbagai aspirasi dan inisiatif masyarakat.

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan di muka, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, langkah penting yang harus dilakukan adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan anggaran pembangunan, maka diharapkan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerahnya (Osborne dan Gaebler, 1993). Di saat yang bersamaan, masyarakat diharapkan banyak berperan dalam membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya.

Berkaitan dengan pengelolaan PAD dan pengeluaran daerah, Kuncoro (2004) menyimpulkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Fakta inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah

daerah yang terlihat dari indikasi inefisiensi pada dana transfer tersebut, dan terlihat dari respons pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan *flypaper effect*. Ditambahkan oleh Ndadari dan Adi (2008), perbandingan penggunaan dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) terhadap penerimaan daerah masih terlalu tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Murniasih dan Mulyadi (2011), yang dalam penelitiannya mengidentifikasi *flypaper effect* belanja daerah antar-pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan variabel PAD dan dana transfer (DAU dan DBH) dengan periode analisis tahun 2005–2011. Dengan menggunakan metode *Pool Least Square* disimpulkan bahwa tingkat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari dana transfer (DAU dan DAK) lebih tinggi dibanding pendapatan daerah (PAD). Hal ini berarti bahwa terjadi gejala *flypaper effect* pada pengelolaan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan transfer yang bersifat *block grant* akan mendorong peningkatan belanja daerah dibandingkan dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah.

Demikian pula Sağbaş dan Saruç (2004) yang dalam penelitiannya mengidentifikasi *flypaper effect* antar-pemerintah daerah di Turki. Analisis *flypaper effect* dilakukan dengan menggunakan dasar teori *fiscal illusion* dan *bureaucratic model*. Hasil penelitiannya menyimpulkan dana transfer antar-pemerintah dapat memengaruhi pengeluaran pemerintah daerah dengan tingkat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari dana transfer (*lumpsum*) lebih tinggi dibanding pendapatan daerah. Hasil penelitian tersebut menyarankan *bureaucratic model* lebih mampu mendeteksi terjadinya gejala *flypaper effect*. Selanjutnya, selain Murniasih dan Mulyadi (2011), di Indonesia juga telah banyak penelitian yang menganalisis fenomena *flypa-*

*per effect* belanja daerah dengan menggunakan objek yang berbeda atau pemerintah kabupaten/kota yang berbeda, dan juga menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif. Beberapa peneliti tersebut adalah Maimunah (2006) yang menganalisis *flypaper effect* belanja daerah di kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menganalisis *flypaper effect* belanja daerah di kabupaten/kota di Indonesia, serta Armawaddin (2015) yang menganalisis *flypaper effect* belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketiga peneliti tersebut menyimpulkan bahwa terdapat *flypaper effect* belanja daerah pada kabupaten/kota yang menjadi objek penelitiannya. Sebaliknya, penelitian Pramuka (2010) serta Putra dan Dwirandra (2015), yang juga menganalisis gejala *flypaper effect* belanja daerah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali dalam penelitiannya, malahan justru tidak menemukan terjadinya *flypaper effect*.

Dengan merujuk pada hasil kajian empiris tersebut, penelitian ini kembali melakukan analisis *flypaper effect* dengan menggunakan variabel dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) dan PAD sebagai variabel prediktor. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa peneliti terdahulu adalah pada bangunan model penelitian. Penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011) untuk menganalisis fenomena *flypaper effect*, menggunakan variabel PAD dan dana transfer (DAU dan DAK) tahun 2005–2011 dengan menggunakan metode *Pooled Least Square*. Sedangkan penelitian ini merekonstruksi model tersebut dengan menambahkan komponen dana perimbangan selain DAU dan DBH yaitu DAK dengan unit analisis yang lebih luas (seluruh kabupaten/kota di Sulawesi) dalam periode tahun 2016–2017 serta menambah tahapan penentuan metode panel data sebelum melakukan estimasi.

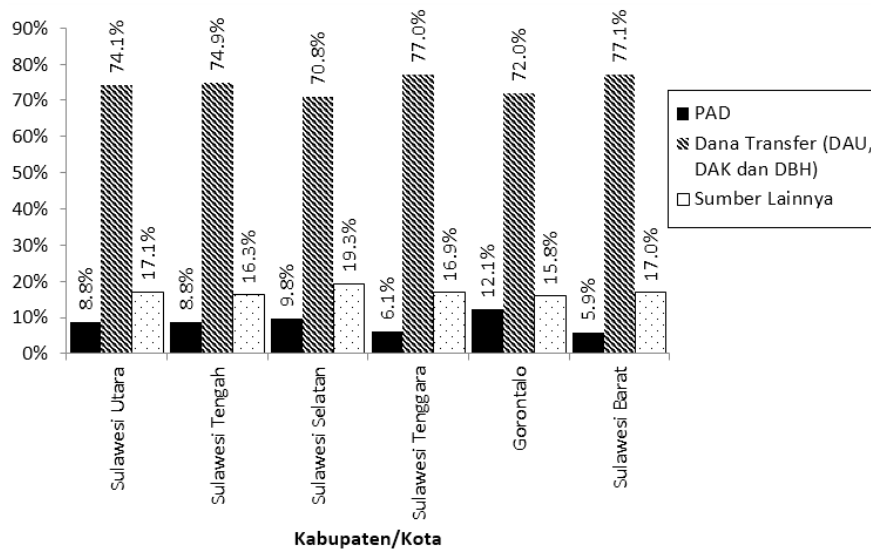
Fenomena *flypaper effect* diduga kuat terjadi di kabupaten/kota di Sulawesi. Fenomena tersebut didasari oleh masih dominannya penggunaan dana transfer untuk membiayai pembangunan di kabu-

paten/kota di Sulawesi dengan kontribusi yang berbeda-beda sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Gambar 1 memperlihatkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi jauh lebih kecil dibanding dengan dana transfer. Rata-rata kontribusi penggunaan dana transfer tahun 2016–2017 berkisar 70,8–77,1%, PAD 5,9–12,1%, dan sumber pendapatan lainnya 15,8–19,3%. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat memiliki kontribusi dana transfer terhadap belanja daerah tertinggi dan kontribusi PAD terendah dibanding provinsi lainnya di Sulawesi. Fakta ini memperlihatkan bahwa pembiayaan pembangunan di kabupaten/kota di Sulawesi masih dominan bergantung pada dana transfer, yang kemungkinan akan menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah yang bisa menimbulkan indikasi inefisiensi pada dana transfer tersebut. Hal ini menurut Kuncoro (2004) bisa menyebabkan *flypaper effect* pada pengelolaan belanja daerah yang bersumber dari dana transfer.

Berdasarkan hasil kajian empiris dan teoritis, khususnya perilaku birokrasi pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi, dan dengan adanya *gap kajian empiris* serta perbedaan bangunan model penelitian, maka diperlukan pendeteksian kembali gejala *flypaper effect* pada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gejala *flypaper effect* belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi. Pertimbangan menggunakan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi sebagai unit analisis dengan menggunakan periode 2016–2017 didasari oleh mekarnya beberapa kabupaten di Sulawesi sampai dengan tahun 2015, sehingga seluruh populasi diambil dalam pengambilan dengan periode 2 tahun.

## Tinjauan Literatur

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Peme-



**Gambar 1:** Rata-rata Kontribusi PAD, Dana Transfer, dan Sumber Pendapatan Lainnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Provinsi di Sulawesi Tahun 2016–2017  
Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> (2016–2017), diolah

rintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan terdiri dari: (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) pendapatan transfer, dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak, retribusi, hak pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer meliputi: transfer pemerintah pusat dan transfer antara daerah. Selanjutnya pendapatan transfer pusat meliputi: dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan pendapatan transfer antara daerah meliputi: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Berdasarkan struktur penerimaan daerah, maka fokus analisis dalam penelitian ini pada analisis dana perimbangan.

Komponen utama dari dana perimbangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang

*JEPI Vol. 18 No. 1 Juli 2017, hlm. 77–91*

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang dianggap sebagai pengurang kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam pengelolaan

penerimaan dan belanja daerah dalam konteks otonomi daerah, terdapat beberapa aspek utama yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Mardiasmo (2004), permasalahan yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan secara umum dapat diidentifikasi menjadi tiga permasalahan, yaitu: (1) bagaimanakah keleluasaan pemerintah daerah dalam menggunakan dana perimbangan maupun dana-dana dari asas dekonsentrasi kepada desentralisasi, (2) pengelolaan keuangan daerah jangan sampai menjadikan beban yang berlebihan kepada masyarakat, tetapi otonomi daerah seharusnya memberikan keleluasaan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri, dan (3) pemerintah pusat seharusnya sungguh-sungguh melimpahkan sebagian urusan-urusannya kepada daerah disertai dengan pembiayaan yang transparan.

Berkaitan dengan keleluasan pemerintah daerah dalam menggunakan dana perimbangan yang meliputi DAU, DAK dan DBH, maka pemerintah daerah harus mampu menjalankan fungsi dan perannya secara efisien, serta anggaran daerah harus mampu menampung dan mengakomodir berbagai aspirasi dan inisiatif masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih lemahnya perencanaan pengeluaran yang dapat memunculkan kemungkinan *under financing* atau *over financing*, yang kesemuanya memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah. Masalah ini tentunya dijumpai pula pada kabupaten dan kota di Sulawesi, yang dapat menyebabkan terjadinya penggunaan belanja daerah yang cenderung tidak efisien atau adanya gejala *flypaper effect*. Namun dugaan ini masih perlu dibuktikan kebenarannya.

Penelitian ini menganalisis *flypaper effect* belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi didasarkan pada dua teori yang dikemukakan oleh Sağbaş dan Saruç (2004), yang menyimpulkan bahwa sumber

munculnya gejala *flypaper effect* berdasarkan teori *fiscal illusion* dan *bureaucratic model*. Teori *fiscal illusion* menerangkan bahwa *flypaper effect* terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian penduduk daerah tentang pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil sebagai akibat dari kesalahan persepsi dari penduduk tersebut (Schwallie, 1986 dalam Sağbaş dan Saruç, 2004). Inti dari gejala *flypaper effect* yang dirangkum Schwallie (1968) dalam Sağbaş dan Saruç (2004):

*"fiscal illusion pada dana transfer adalah pemerintah sebenarnya menghasilkan output yang diminta penduduk, tetapi permintaan penduduk akan barang publik didasarkan pada kesalahan persepsi tentang bagaimana pembiayaan barang publik dan pembagian biaya yang telah ditanggung oleh penduduk. Sebab dalam teori tersebut, penduduk tidak diasumsikan salah dalam mengamati output yang sebenarnya atau manfaat yang akan diperoleh"*.

Pada *bureaucratic model*, *flypaper effect* didefinisikan sebagai hasil dari perilaku memaksimalkan anggaran oleh birokrat yang lebih mudah menghabiskan transfer daripada melakukan kenaikan pajak (Sağbaş dan Saruç, 2004). *Flypaper effect* dapat terjadi karena kekuasaan dan pengetahuan pemerintah daerah pada anggaran dan transfer pemerintah.

Di sisi lain, Niskanen (1968) dalam Kang dan Setyawan (2012) menyatakan bahwa birokrat mempunyai posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan belanja publik. Selanjutnya Niskanen menduga bahwa birokrat akan berperilaku memaksimalkan anggaran sebagai bentuk implikasi dari kekuasaannya. Di dalam model *bureaucratic*, secara implisit mendukung *flypaper effect* sebagai konsekuensi dari perilaku birokrat yang bebas menghabiskan transfer daripada menaikkan pajak yang disebabkan anggapan bahwa program kenaikan pajak tidak populer di mata penduduk daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini mencoba melakukan pengujian terjadinya *flypaper effect* dengan menggunakan variabel dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) dan PAD. Pengujiannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai parameter variabel dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dengan nilai parameter variabel PAD terhadap belanja daerah dengan merujuk pada pengujian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) serta Murniasih dan Mulyadi (2011).

Terkait dengan fenomena *flypaper effect*, penelitian ini juga mengajukan beberapa pengujian hipotesis. Hipotesis pertama akan dilakukan pengujian pengaruh dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) terhadap belanja daerah. Hipotesis ini dirumuskan dari beberapa kajian hasil penelitian sebelumnya yang menguji hubungan antara dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) dan PAD terhadap belanja daerah. Hipotesis ini dibangun berdasarkan pada pandangan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah lebih bergantung pada transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Sementara itu, Kusumadewi dan Rahman (2007) yang mengkaji pengaruh pendapatan terhadap belanja daerah menggunakan hipotesis yang dikenal sebagai *tax-spend hypothesis* (Murniasih dan Mulyadi, 2011). Oleh karena itu, hubungan antara PAD dan DAU terhadap belanja daerah dibangun berdasarkan penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011), Abdullah dan Halim (2004), Kuncoro (2004), Sağbaşı dan Saruç (2004), Maimunah (2006), serta Kusumadewi dan Rahman (2007). Sementara hubungan antara PAD, DAU, DAK dan DBH dibangun berdasarkan penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011), Hidayah dan Setyawati (2014), Sari dan Asyik (2017), dan Ernayani (2017).

Hipotesis kedua akan dilakukan pengujian *flypaper effect* belanja daerah dengan merujuk pengujian Maimunah (2006) serta Murniasih dan Mulyadi (2011) yang diperkuat oleh hasil penelitian Abdullah dan Halim (2004), Kuncoro (2004), Sağbaşı dan

Saruç (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), dan Armawaddin (2015), yang telah membuktikan fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah.

## Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris yang dimaksudkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas melalui pengujian hipotesis (Kerlinger, 2000). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengamati data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada 81 kabupaten/kota (70 kabupaten dan 11 kota) di Sulawesi tahun 2016–2017. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengambil data sekunder yang disediakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Penentuan Model Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Menurut Baltagi (2001), kelebihan yang diperoleh dari penggunaan data panel adalah: (1) mampu mengontrol heterogenitas individu; (2) memberikan informasi yang lebih luas, mengurangi kolinearitas di antara variabel, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien; (3) data panel lebih baik untuk penelitian *dynamic of adjustment*; (4) dapat lebih baik untuk mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat dideteksi dalam model data *cross section* maupun *time series*; dan (5) lebih sesuai untuk mempelajari dan menguji model perilaku (*behavioral models*) yang kompleks

dibandingkan dengan model data *cross section* atau *time series*. Tiga model penaksiran regresi data panel yang salah satunya akan dipilih dan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Model Pooled Least Square (PLS)

Metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data yang berbentuk *pool* merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel. Penerapan model panel PLS dalam penelitian ini adalah:

$$BELANJA_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \mu_{it} \quad (1)$$

dengan:

$BELANJA_{it}$  : Belanja Daerah kabupaten/kota  $i$  tahun ke- $t$ ;

$PAD_{it}$  : Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota  $i$  tahun ke- $t$ ;

$DAU_{it}$  : Dana Alokasi Umum kabupaten/kota  $i$  tahun ke- $t$ ;

$DAK_{it}$  : Dana Alokasi Khusus kabupaten/kota  $i$  tahun ke- $t$ ;

$DBH_{it}$  : Dana Bagi Hasil kabupaten/kota  $i$  tahun ke- $t$ ;

$i$  : Kabupaten/kota di Sulawesi (81 kabupaten dan kota);

$\mu_{it}$  : *Error term* atau galat  $i$  tahun ke- $t$ .

Model PLS mengasumsikan bahwa intersep dan *slope* dari persamaan regresi yang dianggap konstan, baik antar-individu maupun antar-waktu.

#### b. Model Fixed Effect (FE)

Menurut Manurung *et al.* (2005), Persamaan (1) bergantung pada asumsi tentang titik potong, koefisien *slope*, dan *error term*. Ada beberapa kemungkinan dari penaksiran dari *fixed effect*, yaitu:

(a) semua koefisien konstan antar-waktu dan anggota panel;

(b) koefisien *slope* konstan, tetapi titik potong bervariasi antara anggota panel atau *least squares dummy variable* (LSDV);

(c) koefisien *slope* konstan, tetapi titik potong bervariasi antar-anggota panel dan waktu;

(d) semua koefisien bervariasi antar-anggota panel; dan

(e) semua koefisien bervariasi antar-anggota panel dan waktu.

Dari lima kemungkinan tersebut, penelitian ini menggunakan kemungkinan kedua dengan menggunakan data *unbalance pooled*, yaitu koefisien *slope* konstan tetapi titik potong bervariasi antara anggota panel atau *least squares dummy variable* (LSDV). Walaupun titik potong berbeda antar-anggota panel, tetapi antar-waktu tidak berbeda. Adapun model regresi LSDV adalah:

$$BELANJA_{it} = \beta_0 + \alpha_{it}D + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \mu_{it} \quad (2)$$

dengan  $D = [d_1, d_2, \dots, d_i]$  adalah variabel *dummy*. Model Persamaan (2) juga disebut *covariance model* kabupaten dan kota.

#### c. Model Random Effect (RE)

Pengetahuan variabel *dummy* pada model LSDV membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang makna variabel *dummy*, sehingga mendorong penggunaan *error component model* (ECM) atau *random effect model*. Ide dasar dari model ini adalah:

$$BELANJA_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \mu_{it} \quad (3)$$

dengan  $\beta_{0i} = \beta_0 + \mu_i, i = 1, 2, 3, \dots, N$ , substitusi  $\beta_{0i} = \beta_0 + \mu_i$  ke Persamaan (3) dan menghasilkan model regresi:

$$BELANJA_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \mu_i + \mu_{it} \quad (4)$$

$$BELANJA_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + E_{it} \quad (5)$$

*Error term* pada Persamaan (5) terdiri dari dua komponen, yaitu komponen *cross-section* spesifik kabupaten dan kota di Sulawesi ( $\mu_i$ ) dan komponen *error* ( $\mu_{it}$ ). Komponen *error* ( $E_{it}$ ) merupakan kombinasi *time series error* dan *cross-section error*.

Berdasarkan deskripsi ketiga model regresi data panel tersebut, sebelum melakukan pengujian *flypaper effect* dan hipotesis dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian kesesuaian model data panel untuk memilih model mana yang paling tepat yang akan digunakan. Terdapat tiga uji untuk menentukan model panel yang akan digunakan, adalah Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Breusch-Pagan LM. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model PLS dan FE. Uji Breusch-Pagan LM digunakan untuk memilih antara model PLS dan RE. Dan Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model FE dan RE.

Selanjutnya setelah ditentukan model data panel mana yang digunakan dalam penelitian ini, maka tahapan analisis selanjutnya adalah:

#### 1. Pengujian hipotesis

Dalam penelitian ini selain melakukan pengujian terhadap gejala *flypaper effect*, juga dilakukan uji pengaruh DAU, DAK, DBH, dan PAD secara individu terhadap Belanja Daerah. Untuk mengetahui apakah DAU, DAK, DBH, dan PAD secara individu berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dapat diketahui dengan melihat nilai  $t_{hitung}$  masing-masing variabel bebas (DAU, DAK, DBH, dan PAD) yang lebih besar dari nilai kritis pada level 5%.

#### 2. Pendeteksian *flypaper effect*

Untuk mendeteksi terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah yaitu dengan membandingkan efek DAU, DAK, dan DBH dengan efek PAD terhadap belanja daerah dalam regresi tunggal maupun regresi berganda. Dalam regresi tunggal, koefien regresi, nilai *t-statistic*, R, R<sup>2</sup>, dan *adjusted R<sup>2</sup>* masing-masing variabel (regresi) dibandingkan antara DAU, DAK, dan

DBH dengan PAD. Untuk regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Syarat terjadinya *flypaper effect* adalah (a) apabila efek (nilai koefisien) dana transfer DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (b) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*. Nilai koefisien DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada nilai koefisien pengaruh PAD (Maimunah, 2006).

## Hasil dan Analisis

### Penentuan Model Regresi Data Panel

Sebelum penaksiran model regresi, maka terlebih dahulu ditentukan model data panel mana yang akan digunakan untuk interpretasi hasil penelitian. Langkah pertama adalah memilih antara model PLS dan RE. Hasil uji Breusch-Pagan LM terlihat pada Tabel 1. Berdasar hasil uji Breusch-Pagan LM, model yang tepat adalah RE yang dilihat dari nilai LM (46,80803) lebih besar nilai kritis distribusi *chi squares* (df 4,1%= 15,98).

**Tabel 1:** Hasil Uji Breusch-Pagan LM

<i>Cross-section One-sided</i>	<i>Period One-sided</i>	<i>Both</i>
5,299101	41,50893	46,80803
-0,0213	0,0000	0,0000

Langkah kedua adalah menentukan model antara PLS dan FE. Hasil uji Chow terlihat pada Tabel 2. Hasil uji Chow menyimpulkan bahwa model yang tepat adalah model FE yang diketahui dari nilai *probability cross-section chi-square* hitung (0,0028) lebih kecil dari  $\alpha$  0,05.

**Tabel 2:** Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	1,884534	(80,77)	0,0028
<i>Cross-section Chi-square</i>	175,68883	80	0,0000



Langkah ketiga adalah menentukan model antara FE dan RE. Hasil uji Hausman terlihat pada Tabel 3. Hasil uji Hausman menyimpulkan bahwa model yang dipilih adalah model FE yang diketahui dari nilai *probability cross-section chi-square* (0,0439) lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Dari hasil ketiga uji penentuan model tersebut, model data panel yang dipilih untuk melakukan uji hipotesis dan *flypaper effect* adalah model FE.

**Tabel 3:** Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	9,801904	4	0,0439

## Analisis Regresi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa berdasar hasil penentuan model panel, yang dipilih adalah model FE, hal ini sesuai dengan persyaratan model FE menurut Hsio (1986) dalam Murniasih dan Mulyadi (2011) bahwa populasi harus diambil semuanya dan penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi. Hasil *output* model FE terlihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, maka persamaan regresi data panel dengan model FE adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{BELANJA} = & 205969 + D_i + 1,329\text{PAD} + 1,002\text{DAU} \\
 & + 0,615\text{DAK} + 1,919\text{DBH}
 \end{aligned}
 \tag{6}$$

dengan  $D_i$  adalah nilai *dummy* intersep kabupaten ke-1 sampai dengan kabupaten ke-81.

Dengan mensubstitusi nilai *dummy* intersep kabupaten ke-1 sampai kabupaten ke-81 ke dalam Persamaan (7), maka dihasilkan persamaan regresi model FE untuk masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi terlihat pada Lampiran.

Dari Persamaan (7), dapat diturunkan model FE masing-masing kabupaten/kota (*cross-section*) dengan memasukkan *dummy* intersep (lihat Lampiran) untuk membuktikan apakah perilaku pemerintah

kabupaten/kota dalam mengelola belanjanya berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini dilakukan dengan mensubstitusi intersep masing-masing kabupaten/kota ke dalam Persamaan (7), sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi (lihat Lampiran).

Dari Lampiran dapat ditunjukkan bahwa nilai intersep yang berbeda antara kabupaten/kota di Sulawesi. Keadaan ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan awal nilai belanja daerah dari setiap kabupaten/kota di Sulawesi. Perbedaan itu bisa dilihat antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara) dengan Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah) adalah sebesar Rp7.012,25 juta, Kota Makassar (Sulawesi Selatan) dengan Kabupaten Bombana (Sulawesi Tenggara) sebesar -Rp491.076,7 juta, Kota Gorontalo (Gorontalo) dengan Kabupaten Polowali Mandar (Sulawesi Barat) sebesar Rp7.244.311,97 juta, dan seterusnya dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi.

Intepretasi ke 81 model regresi FEM kabupaten/kota dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) konstanta yang bernilai positif, artinya bahwa walaupun tidak ada PAD, DAU, DAK, dan DBH, kabupaten/kota telah melakukan belanja awal sebesar nilai konstanta dari masing-masing kabupaten/kota, dan (2) konstanta yang bernilai negatif, berarti bahwa walaupun tidak ada PAD, DAU, DAK, dan DBH, kabupaten/kota membutuhkan tambahan belanja awal dari sumber lain dalam melakukan pembiayaan daerahnya masing-masing yang nilainya sebesar nilai dari konstanta dari masing-masing kabupaten dan kota di Sulawesi. Secara keseluruhan, penelitian ini telah membuktikan bahwa perilaku kabupaten/kota dalam pengelolaan belanja daerah berbeda antar-kabupaten/kota di Sulawesi tahun 2016–2017.

Selanjutnya hasil analisis regresi secara parsial (Tabel 5), PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan belanja

**Tabel 4:** Regresi Berganda *Fixed Effect Models*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>	<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-squared</i>	<i>F-statistic</i>	<i>Prob(F-statistic)</i>		
C	205968,8	1,574	0,1195	0,988	0,974	7.324.981	0,0000		
PAD	1,329***	8,260	0,0000						
DAU	1,002***	3,810	0,0003						
DAK	0,615***	4,752	0,0000						
DBH	1,919***	3,662	0,0005						
<i>Model Fixed Effect (Cross-Section)</i>									
Kab 1	63752,27	Kab 16	4883149	Kab 31	353057	Kab 46	-40059,66	Kab 61	-58551,49
kab 2	139495,4	Kab 17	19023,4	Kab 32	65323,63	Kab 47	2102201	Kab 62	70992,71
Kab 3	31147,94	Kab 18	-5606118	Kab 33	6841598	Kab 48	-15363,65	Kab 63	-65928,78
Kab 4	-149759,9	Kab 19	-57662,18	Kab 34	44400,78	Kab 49	92049,23	Kab 64	-98403,23
Kab 5	120359	Kab 20	56740,02	Kab 35	114359,4	Kab 50	3862130	Kab 65	-75407,1
Kab 6	17900,27	Kab 21	-161172,7	Kab 36	206665,6	Kab 51	131106,8	Kab 66	-84152,81
Kab 7	57170,04	Kab 22	52677,96	Kab 37	23382,68	Kab 52	132288,1	Kab 67	-16865,38
Kab 8	-121198,9	Kab 23	-167547,7	Kab 38	-16056,46	Kab 53	-11282,28	Kab 68	-95654,35
Kab 9	-38330,79	Kab 24	113956,3	Kab 39	-36074,62	Kab 54	320008,5	Kab 69	-116372
Kab 10	-67201,55	Kab 25	8918740	Kab 40	19299,46	Kab 55	6518121	Kab 70	-62290,34
Kab 11	-46211,77	Kab 26	18933,59	Kab 41	-26921,08	Kab 56	3549558	Kab 71	30772,97
Kab 12	-38794,91	Kab 27	-78773,26	Kab 42	59480,07	Kab 57	-148499,6	Kab 72	-120159,1
Kab 13	-28467,52	Kab 28	-66739,77	Kab 43	-8949016	Kab 58	-16297,41	Kab 73	-2222065
Kab 14	-90249,03	Kab 29	-40501,71	Kab 44	-23807,71	Kab 59	139642,1	Kab 74	-22702,49
Kab 15	-85501,29	Kab 30	-43151,55	Kab 45	135022,4	Kab 60	-12910,16	Kab 75	-95193,84
Kab 76	3493966	Kab 77	-7213539	Kab 78	62505,47	Kab 79	-39082,74	Kab 80	-54319,6
								Kab 81	-67400,76

Keterangan: \*\*\* signifikan pada taraf 1%

daerah. Koefisien parameter DBH (3,578) dan DAU (3,087) lebih besar dibanding PAD (1,935), sedangkan koefisien parameter DAK sebesar 1,007 dan lebih kecil dibanding PAD. Setiap peningkatan DBH dan DAU akan menyebabkan peningkatan belanja daerah yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh peningkatan PAD dan DAK kabupaten/kota di Sulawesi. Hasil regresi tersebut dapat menjawab hipotesis bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah dan Halim (2004), Kuncoro (2004), Sağbaş dan Saruç (2004), Maimunah (2006), serta Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Terkait dengan hasil penelitian pengaruh signifikan PAD, DAU, dan DBH terhadap Belanja Daerah, penelitian ini sejalan dengan penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011).

Berdasar hasil regresi secara parsial tersebut, sejalan dengan hasil regresi linier berganda (Tabel 4), bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah, yang mana secara serempak perubahan Belanja Daerah yang disebabkan oleh PAD, DAU, DAK, dan DBH adalah sebesar 97,42% ( $R^2$  adjusted). Artinya bahwa kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel belanja daerah adalah 97,42% dan sisanya sebesar 2,58% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Selanjutnya untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, maka perlu dibandingkan nilai statistika t keempat variabel tersebut (DAU, DAK, DBH, dan PAD) ketika diregresikan secara parsial dengan ketika diregresikan secara bersama-sama (Prakosa, 2004 dalam Murniasih dan Mulyadi, 2011).

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai statistika t DAK mengalami kenaikan 2,573, dan statistika t DBH mengalami kenaikan 1,828, sedangkan nilai statistika t DAU dan PAD mengalami penurunan masing-masing sebesar 17,763 dan 15,354. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh DAK dan DBH terhadap Belanja Daerah pada tahun yang

**Tabel 5:** Model Regresi Parsial DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap Belanja Daerah

Variabel Independen	Koefisien	Adjusted R <sup>2</sup>	Statistika t	Statistika F
PAD	1,935***	0,952	23,614	40,427
DAU	3,087***	0,944	21,573	34,438
DAK	1,007**	0,639	2,179	4,517
DBH	3,578*	0,633	1,833	4,427

Keterangan: \* signifikan pada taraf 10%  
 \*\* signifikan pada taraf 1%  
 \*\*\* signifikan pada taraf 1%

**Tabel 6:** Analisis Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Variabel Bebas	Statistika t Regresi Parsial	Statistika t Regresi Serempak	Selisih
PAD	23,614	8,260	-15,354
DAU	21,573	3,811	-17,763
DAK	2,179	4,751	2,573
DBH	1,833	3,662	1,828

sama adalah signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Murniasih dan Mulyadi (2011), Hidayah dan Setyawati (2014), Sari dan Asyik (2017), dan Ernayani (2017). Terkait dengan hubungan antara PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011), Abdullah dan Halim (2004), Kuncoro (2004), Sağbaş dan Saruç (2004), Maimunah (2006), serta Kusumadewi dan Rahman (2007).

### Pendeteksian *Flypaper Effect* Belanja Daerah

Untuk mendeteksi terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah, menurut Maimunah (2006), dilakukan dengan membandingkan efek DAU, DAK, dan DBH dengan efek PAD terhadap Belanja Daerah dalam regresi tunggal dan berganda. Syarat terjadinya *flypaper effect* adalah (a) apabila efek (nilai koefisien) dana transfer DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan (Maimunah, 2006).

Berdasar hasil model regresi parsial (Tabel 5) diketahui nilai parameter DAU (3,087) dan DBH (3,578) lebih besar dari PAD (1,935), sedangkan DAK (1,007) lebih kecil dari PAD. Dengan membandingkan ni-

lai koefisien regresi parsial DAU, DAK, dan DBH dengan PAD terhadap Belanja Daerah diketahui bahwa nilai parameter DAU dan DBH lebih besar dari PAD, sedangkan nilai parameter DAK terhadap Belanja Daerah lebih kecil dari PAD. Hasil pengujian ini menyimpulkan bahwa ditemukan adanya *flypaper effect*, sedangkan yang bersumber dari DAU dan DBH ditemukan adanya gejala *flypaper effect*. Selain itu, pada DAK tidak ditemukan *flypaper effect*.

Selanjutnya dengan menggunakan model regresi berganda diketahui nilai parameter DBH (1,919) lebih besar dari PAD (1,329), sedangkan nilai parameter DAU (1,002) dan DAK (0,615) lebih kecil dari PAD (1,329). Dari hasil pengujian dengan model regresi berganda ditemukan adanya *flypaper effect* pada dana belanja daerah yang bersumber dari DBH, sedangkan pada DAK dan DAU tidak ditemukan *flypaper effect*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011) yang membuktikan bahwa fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah yang disebabkan oleh parameter DBH, baik menggunakan model regresi parsial maupun berganda namun berbeda dalam bangunan model. Murniasih dan Mulyadi (2011) menggunakan variabel PAD, DAU, dan DBH, sedangkan penelitian ini menggunakan PAD, DAU,

DBH, dan DAK terhadap Belanja Daerah.

Dengan menggunakan model regresi parsial, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maimunah (2006) serta Murniasih dan Mulyadi (2011) yang diperkuat oleh hasil penelitian Abdullah dan Halim (2004), Kuncoro (2004), Sağbaş dan Saruç (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Hidayah dan Setyawati (2014), dan Armawaddin (2015), yang telah membuktikan fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah. Hasil ini kontradiktif dengan penelitian Pramuka (2010) serta Putra dan Dwirandra (2015) yang tidak menemukan fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah yang bersumber dari DAU.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan:

- (1) bahwa baik dengan menggunakan model regresi parsial dan berganda, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota di Sulawesi;
- (2) bahwa dalam periode 2016–2017, dengan menggunakan model regresi parsial, terdeteksi adanya gejala *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), sedangkan yang bersumber dari dan dana alokasi khusus (DAK) tidak terdeteksi adanya gejala *flypaper effect*;
- (3) dengan menggunakan model regresi berganda, terdeteksi adanya gejala *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBHP)/bukan pajak (DBHBP), sedangkan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak terdeteksi adanya gejala *flypaper effect*.

Sehubungan dengan hal tersebut, saran yang diberikan yaitu: (1) hendaknya Pemerintah Dae-

*JEPI Vol. 18 No. 1 Juli 2017, hlm. 77–91*

rah kabupaten dan kota di Sulawesi lebih menggalang potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, sehingga tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah, di antaranya DAU; dan (2) hendaknya menggunakan model regresi dengan *lag* satu periode sebelumnya pada variabel dana transfer untuk mendapatkan daya prediksi dana transfer yang lebih kuat terhadap belanja daerah.

## Keterbatasan dan Rekomendasi

Keterbatasan penelitian ini adalah belum menganalisis perilaku variabel *cross-section*, seperti perubahan regulasi pemerintah daerah atau faktor eksternal lainnya seperti perilaku birokrat, sehingga direkomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk menganalisis variabel *dummy* tersebut dengan merekonstruksi model penaksiran FEM dengan memasukkan faktor tersebut.

## Daftar Pustaka

- [1] Abdullah, S., & Halim, A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16–17 Oktober 2003, Surabaya*, pp. 1140–1159.
- [2] Armawaddin, M. (2015). Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) UHO*, 16, 13–19.
- [3] Baltagi, B. (2001). *Econometric Analysis of Panel Data, [2nd ed.]*. John Wiley and Sons, Ltd.
- [4] Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)*, 1(1), 43–52.
- [5] Hidayah, N., & Setiyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Untar (Universitas Tarumanagara Journal of Accounting)*, 18(1), 45–58.
- [6] Kang, Y., & Setyawan, D. (2012). Intergovernmental Transfer and the *Flypaper Effect* – Evidence from Municipali-

- es/Regencies in Indonesia. *KDI School Working Papers Series, 12-06*. KDI School of Public Policy and Management. Diakses dari <https://archives.kdischool.ac.kr/bitstream/11125/17304/1/WP%202012-06.pdf>. Tanggal akses 10 September 2017.
- [7] Kerlinger, F. N. (2000). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [8] Kuncoro, H. (2004). Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets [Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang]*, 9(1), 47–63.
- [9] Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67-80.
- [10] Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 23–26 Agustus 2006, Padang.
- [11] Manurung, J. J., Manurung, A. H., & Saragih, F. D. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [12] Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- [13] Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 56–71.
- [14] Ndadari, L. W., & Adi, P. H. (2008). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS)*, 6 September 2008, Surabaya.
- [15] Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Penguins Books.
- [16] Pramuka, B. A. (2010). Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 1–12. DOI: <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.331>.
- [17] Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 811–827.
- [18] Sağbaş, I., & Saruç, N. T. (2004). Intergovernmental transfers and the flypaper effect in Turkey. *Turkish Studies*, 5(2), 79–92. DOI: 10.1080/1468384042000228602.
- [19] Sari, E. T. I., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(5), 1977–1994.
- [20] Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

## Lampiran

Tabel A1: Model FE 81 Kabupaten/kota di Sulawesi

Kab/Kota		Simbol	Intersep	PAD	DAU	DAK	DBH
Bolaang Mongondow	Kabupaten	Kab 1	63752,27	1,329	1,002	0,615	1,919
Minahasa	Kabupaten	Kab 2	139495,4	1,329	1,002	0,615	1,919
Sangihe	Kota	Kab 3	31147,94	1,329	1,002	0,615	1,919
Bitung	Kota	Kab 4	-149759,9	1,329	1,002	0,615	1,919
Manado	Kabupaten	Kab 5	120359	1,329	1,002	0,615	1,919
Kepulauan Talaud	Kabupaten	Kab 6	17900,27	1,329	1,002	0,615	1,919
Minahasa Selatan	Kota	Kab 7	57170,04	1,329	1,002	0,615	1,919
Tomohon	Kabupaten	Kab 8	-121198,9	1,329	1,002	0,615	1,919
Minahasa Utara	Kota	Kab 9	-38330,79	1,329	1,002	0,615	1,919
Kotamobagu	Kabupaten	Kab 10	-67201,55	1,329	1,002	0,615	1,919
Minahasa Tenggara	Kabupaten	Kab 11	-46211,77	1,329	1,002	0,615	1,919
Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten	Kab 12	-38794,91	1,329	1,002	0,615	1,919
Kepulauan Sitaro	Kabupaten	Kab 13	-28467,52	1,329	1,002	0,615	1,919
Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten	Kab 14	-90249,03	1,329	1,002	0,615	1,919
Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten	Kab 15	-85501,29	1,329	1,002	0,615	1,919
Banggai	Kabupaten	Kab 16	4883149	1,329	1,002	0,615	1,919
Banggai Kepulauan	Kabupaten	Kab 17	19023,4	1,329	1,002	0,615	1,919
Buol	Kabupaten	Kab 18	-5606118	1,329	1,002	0,615	1,919
Tolitoli	Kabupaten	Kab 19	-57662,18	1,329	1,002	0,615	1,919
Donggala	Kabupaten	Kab 20	56740,02	1,329	1,002	0,615	1,919
Morowali	Kabupaten	Kab 21	-161172,7	1,329	1,002	0,615	1,919
Poso	Kota	Kab 22	52677,96	1,329	1,002	0,615	1,919
Palu	Kabupaten	Kab 23	-167547,7	1,329	1,002	0,615	1,919
Parigi Moutong	Kabupaten	Kab 24	113956,3	1,329	1,002	0,615	1,919
Tojo Una Una	Kabupaten	Kab 25	8918740	1,329	1,002	0,615	1,919
Sigi	Kabupaten	Kab 26	18933,59	1,329	1,002	0,615	1,919
Banggai Laut	Kabupaten	Kab 27	-78773,26	1,329	1,002	0,615	1,919
Morowali Utara	Kabupaten	Kab 28	-66739,77	1,329	1,002	0,615	1,919
Bantaeng	Kabupaten	Kab 29	-40501,71	1,329	1,002	0,615	1,919
Barru	Kabupaten	Kab 30	-43151,55	1,329	1,002	0,615	1,919
Bone	Kabupaten	Kab 31	353057	1,329	1,002	0,615	1,919
Bulukumba	Kabupaten	Kab 32	65323,63	1,329	1,002	0,615	1,919
Enrekang	Kabupaten	Kab 33	6841598	1,329	1,002	0,615	1,919
Gowa	Kabupaten	Kab 34	44400,78	1,329	1,002	0,615	1,919
Jeneponto	Kabupaten	Kab 35	114359,4	1,329	1,002	0,615	1,919
Luwu	Kabupaten	Kab 36	206665,6	1,329	1,002	0,615	1,919
Luwu Utara	Kabupaten	Kab 37	23382,68	1,329	1,002	0,615	1,919
Maros	Kabupaten	Kab 38	-16056,46	1,329	1,002	0,615	1,919
Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten	Kab 39	-36074,62	1,329	1,002	0,615	1,919
Pinrang	Kabupaten	Kab 40	19299,46	1,329	1,002	0,615	1,919
Kepulauan Selayar	Kabupaten	Kab 41	-26921,08	1,329	1,002	0,615	1,919
Sidenreng Rappang	Kabupaten	Kab 42	59480,07	1,329	1,002	0,615	1,919
Sinjai	Kabupaten	Kab 43	-8949016	1,329	1,002	0,615	1,919
Soppeng	Kabupaten	Kab 44	-23807,71	1,329	1,002	0,615	1,919
Takalar	Kabupaten	Kab 45	135022,4	1,329	1,002	0,615	1,919
Tana Toraja	Kabupaten	Kab 46	-40059,66	1,329	1,002	0,615	1,919

berlanjut...

...lanjutan

Kab/Kota		Simbol	Intersep	PAD	DAU	DAK	DBH
Wajo	Kota	Kab 47	2102201	1,329	1,002	0,615	1,919
Pare-Pare	Kota	Kab 48	-15363,65	1,329	1,002	0,615	1,919
Makassar	Kota	Kab 49	92049,23	1,329	1,002	0,615	1,919
Palopo	Kabupaten	Kab 50	3862130	1,329	1,002	0,615	1,919
Luwu Timur	Kabupaten	Kab 51	131106,8	1,329	1,002	0,615	1,919
Toraja Utara	Kabupaten	Kab 52	132288,1	1,329	1,002	0,615	1,919
Buton	Kabupaten	Kab 53	-11282,28	1,329	1,002	0,615	1,919
Konawe	Kabupaten	Kab 54	320008,5	1,329	1,002	0,615	1,919
Kolaka	Kabupaten	Kab 55	6518121	1,329	1,002	0,615	1,919
Muna	Kota	Kab 56	3549558	1,329	1,002	0,615	1,919
Kendari	Kota	Kab 57	-148499,6	1,329	1,002	0,615	1,919
Bau-Bau	Kabupaten	Kab 58	-16297,41	1,329	1,002	0,615	1,919
Konawe Selatan	Kabupaten	Kab 59	139642,1	1,329	1,002	0,615	1,919
Bombana	Kabupaten	Kab 60	-12910,16	1,329	1,002	0,615	1,919
Wakatobi	Kabupaten	Kab 61	-58551,49	1,329	1,002	0,615	1,919
Kolaka Utara	Kabupaten	Kab 62	70992,71	1,329	1,002	0,615	1,919
Konawe Utara	Kabupaten	Kab 63	-65928,78	1,329	1,002	0,615	1,919
Buton Utara	Kabupaten	Kab 64	-98403,23	1,329	1,002	0,615	1,919
Kolaka Timur	Kabupaten	Kab 65	-75407,1	1,329	1,002	0,615	1,919
Konawe Kepulauan	Kabupaten	Kab 66	-84152,81	1,329	1,002	0,615	1,919
Muna Barat	Kabupaten	Kab 67	-16865,38	1,329	1,002	0,615	1,919
Buton Tengah	Kabupaten	Kab 68	-95654,35	1,329	1,002	0,615	1,919
Buton Selatan	Kabupaten	Kab 69	-116372	1,329	1,002	0,615	1,919
Boalemo	Kabupaten	Kab 70	-62290,34	1,329	1,002	0,615	1,919
Gorontalo	Kota	Kab 71	30772,97	1,329	1,002	0,615	1,919
Gorontalo	Kabupaten	Kab 72	-120159,1	1,329	1,002	0,615	1,919
Bone Bolango	Kabupaten	Kab 73	-2222065	1,329	1,002	0,615	1,919
Gorontalo Utara	Kabupaten	Kab 74	-22702,49	1,329	1,002	0,615	1,919
Majene	Kabupaten	Kab 75	-95193,84	1,329	1,002	0,615	1,919
Mamuju	Kabupaten	Kab 76	3493966	1,329	1,002	0,615	1,919
Polewali Mandar	Kabupaten	Kab 77	-7213539	1,329	1,002	0,615	1,919
Mamasa	Kabupaten	Kab 78	62505,47	1,329	1,002	0,615	1,919
Mamuju Utara	Kabupaten	Kab 79	-39082,74	1,329	1,002	0,615	1,919
Mamuju Tengah	Kabupaten	Kab 80	-54319,6	1,329	1,002	0,615	1,919
Pohuwato	Kabupaten	Kab 81	-67400,76	1,329	1,002	0,615	1,919